

Tipologi alamat di perkotaan dan perdesaan Indonesia dalam proses standardisasi pengalamatan

Heri Sutanta¹, Ni Putu Praja Chintya², Dedi Atunggal¹, Diyono Diyono¹, M. Fakhruddin Mustofa³ dan Suprajaka Siswosudarma³

¹Departemen Teknik Geodesi, Fakultas Teknik UGM, Jl. Grafika No. 2, Sleman, DI Yogyakarta, ²Departemen Teknologi Kebumihan, Sekolah Vokasi UGM, Gedung SV UGM, Sekip Unit 1, Jl. Persatuan, Sleman, DI Yogyakarta, ³Badan Informasi Geospasial, Jl. Raya Bogor, km. 46, Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

Koresponden Email: herisutanta@ugm.ac.id

Direvisi: 2021-01-17 Diterima: 2021-03-03
©2022 Fakultas Geografi UGM dan Ikatan Geograf Indonesia (IGI)

Abstrak. Alamat merupakan salah satu komponen wajib pada identitas penduduk dan dokumen legal-formal lain yang digunakan dalam berbagai kepentingan serta kegiatan sehari-hari. Dalam dunia nyata terdapat variasi penulisan alamat. Variasi penulisan alamat ini memiliki elemen yang terkait aspek lokalitas wilayah maupun yang terkait dengan ketiadaan standar pengalamatan. Variasi penulisan alamat diinventarisasi melalui survei lapangan dan survei secara daring. Survei dilakukan di wilayah perdesaan dan perkotaan untuk dapat memotret berbagai tipe penulisan alamat. Tipologi penulisan alamat tersebut kemudian diklasifikasikan berdasar dua model. Berdasarkan fungsinya, ada alamat yang digunakan untuk kepentingan legal-formal dan alamat yang digunakan untuk penunjuk atau penanda lokasi. Berdasarkan karakteristik wilayahnya terdapat tipologi alamat perdesaan dan alamat perkotaan. Di model alamat perdesaan terdapat 18 komponen sedangkan di model alamat perkotaan terdapat 16 komponen. Selanjutnya, berdasarkan tipologi alamat yang diperoleh dan kebutuhan alamat dalam kegiatan legal-formal ditetapkan sifat kewajiban setiap komponen alamat. Tiga sifat yang ditetapkan meliputi wajib (W), bersyarat (B), dan opsional (O). Hasil penetapan ini selaras dengan RSNi2 tentang Pengalamatan di Wilayah Perdesaan dan Perkotaan di Indonesia.

Kata kunci: alamat, tipologi, perkotaan, perdesaan, standardisasi

Abstract. Address is one of the mandatory components of resident identity and other legal-formal documents used in various interests and daily activities. In the real world, there are variations of writing addresses. This variation of address writing has elements related to regional locality aspects and those associated with the absence of addressing standards. Address writing variations were inventoried through field surveys and online surveys. The survey was conducted in rural and urban areas to portray various types of address writing. The typology of address writing is then classified based on two models. Based on its function, there are addresses used for legal-formal purposes and addresses used for pointers or location markers. Based on the characteristics of the region, there are typologies of rural addresses and urban addresses. In the rural address model, there are 18 components, while in the urban address model, there are 16 components. Furthermore, based on the typology of addresses obtained and the need for addresses in legal-formal activities, the nature of the obligations of each component of the address is determined. The three defined properties include mandatory (W), conditional (K), and optional (O). The results of this determination are in line with the RSNi2 concerning Addressing in Rural and Urban Areas in Indonesia.

Keywords: address, typology, urban, rural, standardization

PENDAHULUAN

Alamat adalah suatu informasi berbentuk tekstual yang berfungsi untuk menunjukkan suatu lokasi dan merupakan 'political technology' yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan di pemerintahan (Lind, 2008; Rose-Redwood & Tantner, 2012; Dumedah, 2021) Pemanfaatan alamat pada mulanya hanya untuk kepentingan pengiriman paket dan surat, tetapi sekarang sudah berkembang ke pencarian rute, analisis kriminalitas, dan *geo-marketing* (Coetzee & Bishop, 2009; Ratcliffe, 2004). Model alamat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk alamat terstruktur dan alamat dalam bentuk deskripsi. Alamat terstruktur memiliki komponen-komponen yang sudah

ditentukan dalam suatu aturan atau standar sedangkan alamat dalam bentuk deskripsi adalah suatu narasi yang menunjukkan lokasi suatu objek alamat berada.

Alamat terdiri atas komponen-komponen alamat dengan sifat masing-masing (Federal Geographic Data Committee, 2011; Goldberg et al., 2008). Di Indonesia, komponen alamat yang merupakan kunci dari suatu alamat ditemukan masih bervariasi. Variasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tipe daerah (perkotaan, perdesaan), kebiasaan, budaya, dan nilai-nilai kearifan lokal yang dianut oleh masyarakat (Author dkk., 2021). Banyaknya jenis komponen alamat dapat mempengaruhi cara penulisan alamat. Banyak

ditemui di lapangan cara penulisan alamat yang berbeda untuk alamat yang sama. Hal ini memberikan dampak terhadap efisiensi berbagai aktivitas penduduk maupun ketepatan dalam pembuatan *geocoding* (Chow et al., 2016). Selain itu, alamat juga merupakan informasi esensial bagi pelaku pengiriman barang dan jasa. Kurir akan mengalami kesulitan menemukan alamat yang tidak ditulis secara lengkap atau tidak tepat. Tipologi bentang alam negara Kepulauan Indonesia sangat unik yang berbeda dengan tipologi negara lain yang menjadi bagian benua. Variasi keberadaan penduduk Indonesia berada di pesisir sampai pegunungan, dari tipe perdesaan sampai tipe perkotaan di berbagai bentang alam cukup berpengaruh dalam hal penamaan alamat dan tidak mudah dalam pengaturan alamat yang teratur.

Kondisi ini menuntut adanya suatu standar atau aturan yang mengatur bagaimana alamat ditetapkan dan dituliskan. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Dalam konteks inilah, standardisasi pengalamatan dibutuhkan agar diperoleh manfaat maksimal/sebesar-besarnya dalam mendukung tata kelola administrasi pemerintahan. Dalam kegiatan sehari-hari, alamat yang teratur, mudah dipahami, dan konsisten cara penyajiannya mempermudah masyarakat mencari lokasi (*human wayfinding*). Gambar 1 menunjukkan hubungan antara aktivitas pencarian lokasi dan standardisasi alamat.

Berdasarkan Gambar 1, alamat yang terstandardisasi berperan penting dalam pencarian lokasi. Peran pertama adalah dalam mendeskripsikan tempat dengan alamat yang unik dan tidak ambigu. Selanjutnya adalah dalam menemukan arah berdasarkan alamat yang jelas. Sedangkan peran terakhir adalah dalam mengomunikasikan tempat dan arah ke pihak-pihak yang sedang mencari lokasi. Aktivitas-aktivitas ini sangat terbantu jika alamat yang ada sudah terstandardisasi. Namun demikian, standardisasi alamat masih jarang dilakukan secara konsisten.

Beberapa daerah di Indonesia memiliki aturan atau tata cara mengatur alamat yang bersifat lokal, misalnya aturan Peraturan Walikota Batu Nomor 12 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penomoran Rumah dan Bangunan di Kota

Batu, Peraturan Daerah Kabupaten Sindenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penamaan Jalan dan Penomoran Bangunan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Nama-Nama Jalan dan Penomoran Rumah/Bangunan. Peraturan-peraturan tersebut memiliki definisi komponen alamat yang bervariasi dan tidak menjelaskan tata cara menuliskan komponen-komponen alamat serta sifatnya (wajib/bersyarat/opsional) secara detail. Salah satu kendala dalam implementasi peraturan-peraturan tentang alamat adalah tidak tersedianya atau tidak dapat diaksesnya data spasial skala besar yang bisa memfasilitasi proses tersebut (Author dkk., 2016).

Di satu sisi, regulasi-regulasi lokal yang sudah ada perlu didorong implementasinya pada daerah masing-masing dan menyempurnakan bagian-bagian yang kurang. Namun pada level nasional perlu didorong juga penerbitan regulasi tentang standar pengalamatan. Dukungan ini juga menjadi bagian penting dalam mendorong implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi. Standar yang bersifat nasional membuat pemberian nama, penomoran, dan penulisan objek alamat memiliki keseragaman bentuk secara nasional.

Beberapa negara di dunia sudah memiliki aturan serta aturan teknis yang mengatur tentang alamat. Sebagai contoh negara Australia dan Selandia Baru dengan AS/NZS 4819:2011 tentang *Urban and Rural Addressing*, Amerika Serikat dengan *U.S. Thoroughfare, Landmark, and Postal Address Data Standard*, dan Afrika Selatan dengan SANS 1883-1, *Geographic information – Address, Part 1: Data format of addresses* dan SANS 1883-3, *Geographic information – Address, Part 3: Guidelines for address allocation and updates* (Hockaday, 2008; ISO, 2015, 2017; South African Bureau of Standards (SABS), 2009a, 2009b). Alamat yang merupakan informasi kunci sebagai identitas identitas lokasi diatur juga oleh peraturan internasional seperti ISO 19160-1:2015, *Addressing Part 1: Conceptual Model*, ISO 19160-4 *Addressing – International postal address components and template language*, dan Universal Postal Union (UPU) S53, *Exchange of Name and Address Data*.

Di dalam petunjuk penulisan alamat pengiriman oleh Universal Postal Union, (2013), tata cara penulisan alamat setiap negara dijelaskan. Menurut UPU, penulisan alamat di Indonesia dibagi menjadi dua bagian yaitu penulisan alamat untuk pengiriman ke wilayah perkotaan dan perdesaan. Petunjuk ini menjelaskan beberapa kondisi yang ada di



Gambar 1. Peran Standar Alamat dalam Pencarian Lokasi (dimodifikasi dari Gluck, 1991)

Indonesia tetapi tidak mengakomodasi variasi alamat yang ada di Indonesia. seperti alamat yang tidak urut, penulisan nama jalan yang berbeda-beda, dan tidak konsistennya penggunaan komponen alamat baik di wilayah perkotaan dan perdesaan. Variasi dalam penulisan alamat sering menyebabkan alamat tidak bersifat unik. Alamat yang bersifat unik berarti kombinasi komponen-komponen alamat hanya menunjuk satu lokasi dan satu lokasi hanya memiliki satu alamat (Land Information New Zealand, 2018). Wilayah perdesaan mengacu pada karakteristik dari suatu masyarakat sedangkan definisi dari desa menurut Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 51 tahun 2007 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di beberapa daerah di Indonesia terdapat penggunaan istilah administratif setingkat desa seperti nagari di Provinsi Sumatera Barat (Azwar et al., 2020), kalurahan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan pekon di Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Wilayah perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Memperhatikan kondisi tersebut, variasi alamat di Indonesia perlu dikaji sebagai dasar pembakuan tata cara penetapan serta penulisan alamat di Indonesia. Indonesia sudah memiliki tim nasional pembakuan nama rupabumi yang di atur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2006 dan kemudian diatur kembali pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi. Aturan ini dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam membuat standar pengalamatan mengingat bahwa alamat merupakan salah satu komponen nama rupabumi yang sangat penting. Nama rupabumi unsur buatan manusia merupakan bagian besar berupa objek alamat. Namun demikian, tata cara penomoran rumah/bangunan dan pemberian kode lokasi belum diatur dalam Perpres tersebut.

Variasi penulisan dan unsur alamat terdapat di berbagai wilayah Indonesia. Oleh karena itu, untuk memperoleh informasi yang tepat mengenai ragam komponen alamat di Indonesia, perlu dilakukan inventarisasi tipe-tipe alamat di Indonesia dalam rangka merumuskan suatu acuan yang berlaku secara nasional. Acuan alamat tersebut diwujudkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI). Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi dan mengklasifikasikan tipologi alamat yang ada di Indonesia. Tipologi alamat yang disusun dimanfaatkan dalam penyusunan SNI supaya tidak ada model alamat yang secara riil telah digunakan masyarakat tidak terwadahi dalam SNI. Dalam konteks Satu Data Indonesia sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, standarisasi pengalamatan ini juga mendukung keberadaan regulasi tersebut karena salah satu bagian penting dari satu data adalah adanya standar. Hal ini sejalan juga dengan regulasi yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu terkait dengan kebijakan satu peta di Indonesia, yaitu yang terkait dengan penamaan unsur rupabumi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan dua metode yaitu survei lapangan dan survei daring. Survei lapangan dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung penulisan alamat dan pemanfaatan alamat oleh berbagai kelompok masyarakat. Survei daring digunakan untuk mendapatkan informasi penulisan alamat di berbagai wilayah serta mendapatkan data penulisan alamat pada berbagai dokumen resmi pemerintah dan masyarakat. Data alamat yang digunakan merupakan informasi terbuka yang tersedia luas dan dapat diakses oleh siapapun. Tahapan penelitian disajikan pada Gambar 2.

Survei di lapangan dilakukan dengan mengunjungi secara langsung lokasi yang ingin diketahui struktur alamatnya, kemudian memotret atau merekam plang alamat yang tertera pada suatu objek. Surveyor merekam dan mendata jalan pada satu segmen jalan yang sama sehingga diketahui variasi/pola penamaan alamatnya. Pada segmen jalan yang lain juga dilakukan perekaman/pendataan alamat jalan sehingga diketahui berbagai pola penamaan. Selain itu posisi dari objek direkam menggunakan aplikasi berbasis geospasial Survey123 dari Esri. Pada survei lapangan juga dilakukan wawancara dengan masyarakat dan aparat pemerintahan dari berbagai instansi di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Diskusi kelompok terpumpun dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo dan Sleman serta Kota Semarang. Peserta diskusi di Kabupaten Sleman berasal dari perwakilan perusahaan yang sehari-hari menggunakan alamat dengan intensif yaitu PT POS Indonesia, TIKI, JNE, dan pengemudi transportasi daring.

Untuk objek bangunan yang tidak mencantumkan plang alamat maka survei dapat dilengkapi dengan mewawancarai pemilik bangunan. Wawancara dengan pemilik bangunan dilakukan untuk mendapat informasi dan konfirmasi saat ditemukan penulisan alamat atau penomoran objek alamat yang tidak wajar. Selain dengan pemilik bangunan, peneliti juga melakukan wawancara dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota, serta desa/kelurahan untuk membahas permasalahan penulisan alamat di daerah tersebut dan mendapat masukan/tanggapan tentang standarisasi alamat.

Survei lapangan ini dilengkapi dengan survei secara daring yang dilakukan untuk mendapatkan informasi alamat dan contoh penulisan alamat resmi. Informasi penggunaan alamat diperoleh dari foto-foto pada Google Street View. Data penulisan alamat di berbagai wilayah Indonesia diperoleh melalui penelusuran informasi terbuka alamat tempat tinggal anggota DPR dan DPRD di seluruh provinsi di Indonesia. Identitas pemilik alamat tidak dicatat karena merupakan informasi personal.

Hasil survei kemudian disajikan sebagai tabel yang menunjukkan variasi penulisan alamat. Variasi alamat yang didapat kemudian digunakan untuk merumuskan tipologi alamat. Tipologi alamat ini digunakan untuk mengklasifikasi komponen alamat wilayah perdesaan dan perkotaan beserta sifat komponennya (wajib, bersyarat, dan opsional) dalam standar nasional pengalamatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tipe alamat yang ditemukan dalam survei memiliki variasi yang tinggi. Variasi terdapat dalam hal cara penulisan, kelengkapan komponen alamat yang ditulis,

ketepatan penulisan alamat, keteraturan penomoran objek alamat, dan penggunaan alamatnya. Namun demikian, variasi alamat tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan karakteristik wilayahnya.

Berdasarkan temuan dari diskusi kelompok terpumpun, fungsi alamat dibagi menjadi dua yaitu alamat dalam dokumen legal-formal dan alamat sebagai penunjuk lokasi. Berdasarkan karakteristik wilayahnya, alamat terdiri atas alamat perdesaan dan perkotaan. Karakteristik wilayah tidak selalu berhubungan langsung status administrasi wilayah. Terdapat bagian wilayah kota yang memiliki karakter perdesaan, dan sebaliknya bagian wilayah desa yang memiliki karakter perkotaan. Kedua jenis klasifikasi tersebut dapat saling berhubungan, misalnya alamat legal-formal di perkotaan atau alamat penunjuk lokasi di wilayah perdesaan.

Alamat berdasarkan fungsi

Alamat legal-formal adalah alamat resmi yang didaftarkan pada otoritas pemerintah serta merupakan alamat yang digunakan dalam dokumen yang memiliki kekuatan hukum. Alamat formal biasanya ditemui pada dokumen resmi seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, kop surat, akta, dan berbagai dokumen resmi lainnya. Beberapa kodifikasi berupa angka/nomor sebuah entitas spasial umumnya juga menjadi bagian dari alamat formal seperti urutan rukun tetangga, urutan rukun warga, hingga kode pos.

Alamat legal-formal sangat penting dalam penunjukkan lokasi secara legal-formal. Apabila terdapat kesalahan dalam alamat, misalnya penomoran, alamat legal-formal tetap memiliki kekuatan hukum. Ketidaktepatan penulisan dan pengurutan nomor objek alamat dalam dokumen legal-formal, sepanjang dokumen tersebut dinyatakan sah, tetap berlaku dan mengikat. Hal ini merupakan salah satu potensi tantangan dalam standarisasi alamat.

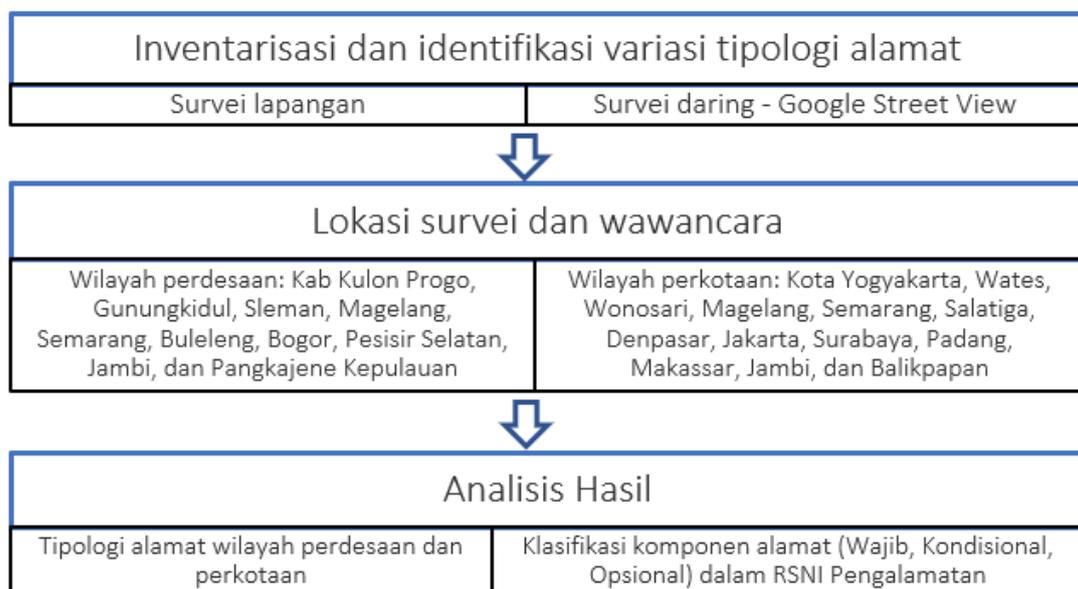
Tipe fungsi alamat yang kedua adalah alamat untuk penunjuk lokasi. Kondisi yang ditemui di lapangan adalah alamat yang dituliskan dengan singkat dengan tujuan mempermudah penulisan dan mempercepat membaca

alamat yang tertulis. Alamat jenis ini biasanya ditemukan pada alamat yang tertera pada baliho, papan nama, plang nama, kartu nama, serta spanduk. Komponen alamat tidak dituliskan selengkap alamat formal, misalnya di kawasan pertokoan atau perkantoran komponen alamat yang ditulis hanya berupa nama jalan, nomor rumah/bangunan, dan nama kota. Komponen-komponen seperti nama desa/kelurahan, RT/RW, kabupaten, serta provinsi tidak dituliskan. Gambar 3a, b, c, d menunjukkan contoh alamat jenis ini.

Pada Gambar 3a, b, c, d alamat yang tertera adalah Jl. Taman Surya no. 1, Surabaya; Jl. Irigasi Gempol, Jakarta Timur; Jl. Raya Blabak, no. 1, Mungkid, Magaleng; dan Jalan Imam Bonjol nomor 176, Denpasar. Komponen alamat yang digunakan pada ketiga alamat tersebut adalah nama jalan, nomor bangunan, dan nama kota.

Selain kondisi di atas, alamat informal juga banyak digunakan dalam proses pengiriman surat dan barang menggunakan aplikasi belanja *online*. Alamat informal adalah penyingkatan alamat formal dan penambahan informasi penunjuk lokasi (*landmark*) untuk memudahkan pencarian alamat. Alamat informal digunakan karena penulisan alamat formal yang panjang tidak didukung oleh aplikasi serta tidak mudah dicari. Selain itu adanya menu *tagging* lokasi mempermudah dalam pencarian alamat. Dasar pemberian nama alamat informal bervariasi dan cenderung tidak berdasarkan regulasi yang ada. Apalagi bila belum ada regulasi setempat yang mengaturnya. Dasar pemberian dapat karena faktor kebiasaan yang berlaku di kompleks setempat, mengurutkan dari alamat yang sudah ada, maupun berdasarkan keadaan geografisnya.

Gambar 3c menunjukkan alamat sebuah tempat usaha di daerah Blabak, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang. Penetapan alamat tersebut tidak berdasarkan aturan apapun, tetapi pemilihan oleh pemilik bangunan. Bangunan tersebut merupakan yang pertama yang menuliskan alamat di tempat tersebut. Nama jalan dan nomor bangunan dipilih sendiri oleh pemilik tempat usaha dengan persetujuan Ketua RT setempat. Ketika sudah menjadi alamat, bangunan-bangunan di sekitarnya akhirnya



Gambar 2. Metode penelitian

menyesuaikan. Secara resmi, nama jalan di ruas tersebut masih merupakan Jalan Magelang.

Tipologi alamat perdesaan

Berdasarkan hasil survei di lapangan, wawancara, dan survei menggunakan Google Street View ditemukan beberapa jenis alamat yang ditemui di wilayah perdesaan. Perdesaan yang dimaksud di sini adalah kawasan desa atau yang memiliki karakteristik perdesaan. Alamat yang digunakan di sisi jalan yang berada di luar kota juga termasuk dalam kategori ini.

Wilayah perdesaan mengacu pada karakteristik dari suatu masyarakat sedangkan definisi dari desa menurut Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 51 tahun 2007 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di beberapa daerah di Indonesia terdapat penggunaan istilah administratif setingkat desa seperti nagari di Provinsi Sumatera Barat (Azwar et al., 2020), kalurahan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan pekon di Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Tabel 1 menunjukkan pola penulisan alamat yang ditemui pada kawasan perdesaan.

Posisi suatu desa bisa berpengaruh terhadap bagaimana pengalamatan di desa tersebut, seperti desa yang berada di pinggiran kota atau desa yang berada di koridor antar kota. Desa yang secara geografis terletak dekat dengan area perkotaan dapat memiliki tipologi alamat perkotaan dan perdesaan sekaligus. Rumah dan bangunan lain di pinggir jalan utama menggunakan model alamat perkotaan,

sedangkan rumah dan bangunan yang terletak di bagian dalam menggunakan model alamat perdesaan. Kasus yang sama juga terjadi pada kampung-kampung di kota-kota kecil atau sedang.

Tipologi alamat perdesaan tentu saja juga digunakan di berbagai pelosok Indonesia juga terletak jauh dari perkotaan terutama di luar Pulau Jawa. Tidak sedikit wilayah desa yang hanya dapat diakses dengan jalan kaki dan hanya ditemukan beberapa kelompok rumah yang terpisah dari blok rumah di kampung lainnya. Contoh kondisi seperti ini dapat ditemui di Kabupaten Belu dan Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.

Kondisi alamat yang khusus dapat ditemui di pulau-pulau kecil yang memiliki wilayah terbatas dan penduduk yang relatif sedikit. Contoh kondisi ini ditunjukkan di Gambar 4. Penulisan alamat di daerah seperti ini melibatkan nama pulau. Nama pulau merupakan identitas yang unik dan bisa membantu pencarian lokasi dengan cepat.

Tipologi alamat perkotaan

Kota-kota di Indonesia secara umum terdiri atas kampung dan kota. Kampung kota merupakan salah satu ciri khas kota-kota yang ada di Indonesia. Kampung merupakan istilah yang menyertakan daerah permukiman yang tidak teratur dari sebuah kota (Setiawan, 1998). Penulisan alamat wilayah perkotaan di Indonesia yang bertipe kota dan tipe kampung berbeda. Penulisan alamat untuk tipe kota adalah menggunakan nama jalan dan nomor rumah sebagai komponen utama alamat. Format alamat untuk kampung adalah menggunakan nomor rumah dan dilengkapi dengan penggunaan komponen nama kampung, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Nama kampung, Rukun Tetangga dan Rukun Warga tidak digunakan dalam



Gambar 3. Contoh alamat dalam paparan nama Lembaga dan tempat usaha

pemberian alamat untuk tipe kota yang memiliki komponen nama jalan dan nomor rumah.

Tipologi objek alamat di perkotaan Indonesia yang kompleks terutama kota-kota besar dan berada pada variasi lokasi tertentu juga berpengaruh pada penamaan alamat. Ciri khas perkotaan berupa bangunan atau permukiman jalan-jalan besar/protokol sampai gang-gang sempit bahkan di permukiman tepi sungai berderet mengikuti alur sungai, akan berpengaruh pada penamaan alamat. Kondisi tipe bangunan perkotaan juga bervariasi, sebagai contoh terdapat blok rumah susun, blok perkantoran dalam bentuk ruko atau bangunan bertingkat, blok pusat pertokoan/mal, dan tipe lainnya. Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap penamaan alamat.

Komponen alamat

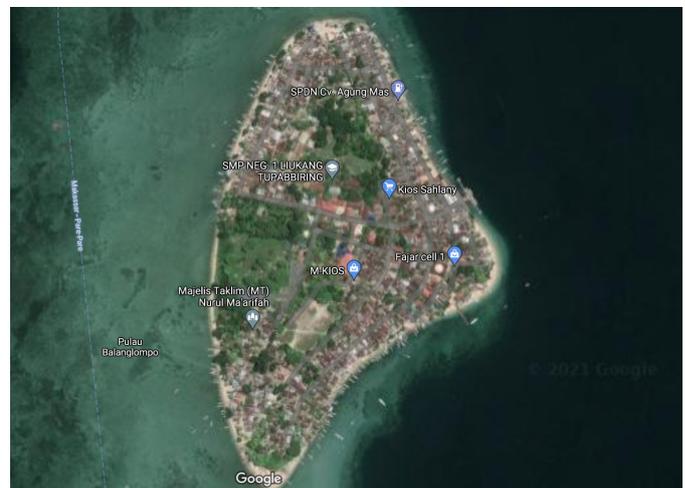
Penulisan alamat legal-formal dan penunjuk alamat di wilayah perdesaan dan perkotaan memiliki beberapa komponen. Terdapat komponen yang ditemukan di semua wilayah, namun di sisi lain terdapat komponen yang hanya terdapat di wilayah tertentu saja. Keberadaan dan penggunaan komponen alamat menentukan sifat komponen alamat dalam standar nasional.

Tiga sifat pemanfaatan komponen alamat yang digunakan adalah Wajib (W), Bersyarat (B), dan Opsional (O). Komponen alamat yang bersifat Wajib harus ditampilkan. Komponen ini terdiri atas satuan wilayah administrasi dengan tingkat paling rendah adalah desa atau penyebutan sejenis. Komponen alamat ini ditemukan di seluruh wilayah Indonesia. Komponen yang bersifat bersyarat wajib ditampilkan jika ada, tetapi tidak perlu ditampilkan jika objek alamat tersebut tidak memilikinya. Sebagai contoh adalah nama gang. Jika objek alamat tidak terletak di gang dan penulisannya tidak menggunakan nama gang, seperti yang biasa ditemui di desa-desa, maka nama gang tidak perlu ditampilkan. Komponen yang bersifat opsional dapat ditampilkan ataupun tidak. Penggunaan kata

“nomor” rumah dapat dituliskan atau dapat juga langsung menuliskan nomor rumahnya.

Berdasarkan hasil inventarisasi komponen alamat melalui survei langsung dan daring, komponen alamat diklasifikasikan. Klasifikasi komponen alamat di Tabel 1 dan Tabel 2 digunakan untuk menetapkan sifat setiap komponen alamat. Tabel 3 menyajikan komponen alamat dan sifatnya untuk wilayah perdesaan, sedangkan Tabel 4 untuk wilayah perkotaan.

Alamat perdesaan memiliki 18 komponen, dari awalan nama jalan sampai kode pos. Lima komponen bersifat wajib, yaitu empat satuan administrasi wilayah berupa desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi serta ditambah dengan kode pos. Keempat satuan administrasi wilayah tersebut ada di semua tempat di Indonesia, walaupun ada yang menggunakan nama yang berbeda. Kode pos merupakan kode yang digunakan secara internasional dan juga tersedia di seluruh wilayah Indonesia. Kode pos penting digunakan pada jalan-jalan di luar kota yang panjang dan



Gambar 4. Permukiman di pulau kecil

Tabel 1. Tipologi alamat perdesaan

Tipologi alamat perdesaan
RT/RW + padukuhan + desa + kecamatan + kabupaten/kota
RT/RW + padukuhan + desa + kecamatan + kabupaten/kota + provinsi
padukuhan + desa + kecamatan + kabupaten/kota
Nama jalan + nomor + padukuhan + desa + kecamatan + kabupaten/kota
Nama jalan + kilometer + desa + kecamatan + kabupaten/kota
Nama jalan + kilometer + nomor + desa + kecamatan + kabupaten/kota
Nama gang + nomor + nama jalan + padukuhan + kelurahan/desa + kecamatan + kabupaten/kota
Nama gang + nomor + nama jalan + kilometer + nomor + desa + kecamatan + kabupaten/kota
Nama gang + nomor rumah + RT/RW + padukuhan + kelurahan/desa + kecamatan + kabupaten/kota
Nama bangunan/kompleks + nomor + padukuhan + RT/RW + kelurahan/desa + kecamatan + kabupaten/kota
Nama pulau + kelurahan/desa + kecamatan + kabupaten/kota
Nama bangunan/kompleks + nama pulau + kelurahan/desa + kecamatan + kabupaten/kota

Catatan: padukuhan dan desa/kelurahan dapat memiliki nama lain, misalnya kampung/banjar dan nagari/gampong.

Tabel 2. Tipologi alamat perkotaan

Tipologi alamat perkotaan
Nama jalan + nomor + kota
Nama jalan + nomor + Kecamatan + kabupaten/kota
Nama jalan + nomor + kelurahan/desa + kecamatan + kabupaten/kota
Nama jalan + nomor + padukuhan + kelurahan/desa + kecamatan + kabupaten/kota
Nama jalan + nomor + padukuhan + kelurahan/desa + kecamatan + kabupaten/kota + provinsi
Nama gang + nomor + nama jalan + padukuhan + kelurahan/desa + kecamatan + kabupaten/kota
Nama gang + nomor + RT/RW + padukuhan + kelurahan/desa + kecamatan + kabupaten/kota
Nama bangunan/kompleks + nama jalan + nomor + padukuhan + kelurahan/desa + kecamatan + kabupaten/kota
Nama bangunan/kompleks + nomor + padukuhan + RT/RW + kelurahan/desa + kecamatan + kabupaten/kota

melintasi wilayah administrasi yang berbeda.

Dua komponen memiliki sifat opsional, yaitu akhiran nama jalan dan awalan nomor rumah. Akhiran nama jalan yang berupa angka kilometer (misalnya Jl. Raya Bogor Km. 46) merupakan angka penanda ketika suatu daerah belum begitu berkembang. Saat suatu daerah semakin berkembang maka penanda Km menjadi berkurang fungsinya. Di samping itu sering ditemui angka penanda Km yang tidak teratur dan saling berlompatan. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya acuan resmi yang mudah diakses oleh masyarakat. Awalan nomor rumah (No. atau Nomor) dapat ditulis atau tidak. Apabila tidak ditulis, nomor rumah atau bangunan dapat langsung dituliskan sesudah nama jalan atau gang.

Sifat bersyarat diterapkan 11 komponen yang lainnya. Sebagai contoh adalah RW dan padukuhan. Jika di suatu daerah tidak terdapat RW seperti di Kabupaten Bantul, atau tidak terdapat padukuhan seperti di Kota Yogyakarta, maka komponen ini tidak perlu ditampilkan. Sebaliknya, jika di tempat lain terdapat RW dan Padukuhan, maka komponen ini wajib dimunculkan. Pengaturan ini berlaku untuk komponen lain yang dilekati sifat bersyarat.

Komponen alamat untuk wilayah perkotaan ada 16. Komponen awalan pulau dan nama pulau tidak digunakan dalam alamat wilayah perkotaan. Jumlah komponen bertambah tiga, yaitu awalan nama jalan/gang, nama jalan/gang, dan nomor rumah/bangunan. Jumlah komponen alamat yang bersifat opsional bertambah tiga yaitu RT, RW, dan padukuhan. Dengan demikian jumlah komponen yang bersifat bersyarat berkurang menjadi tiga yaitu akhiran nomor rumah/bangunan, nama objek, dan nomor unit.

Komponen alamat perkotaan dan perdesaan memiliki perbedaan sifat dalam penggunaannya. Sebagai contoh penulisan nama RT menjadi komponen bersyarat di wilayah perdesaan, sedangkan di wilayah perkotaan menjadi komponen yang bersifat opsional. Hal ini disebabkan di wilayah perkotaan sebagian besar objek bangunan menggunakan nama jalan/gang serta nomor rumah sebagai komponen utama dalam penulisan alamat. Berbeda dengan wilayah perdesaan, sebagian besar objek bangunan tidak memiliki nomor rumah, sehingga komponen wilayah administrasi terkecil yaitu RT menjadi dasar penting dalam menemukan suatu objek alamat. Penggunaan kode pos sebagai bagian penulisan alamat dan bersifat wajib menjadi salah satu bagian penting dalam optimasi regulasi/Undang-undang tentang Pos, sekaligus memperkuat kode referensi yang dapat mendukung Satu Data Indonesia.

Tipologi alamat dalam standarisasi alamat

Dalam proses standarisasi alamat, tipologi alamat merupakan kunci untuk menentukan komponen-komponen yang wajib dituliskan pada alamat. Tipologi alamat merupakan hasil inventarisasi komponen-komponen alamat sebagai hasil klasifikasi alamat-alamat yang diperoleh dari survei lapangan dan survei secara daring. Komponen-komponen menjadi dasar dalam menentukan tipe-tipe penulisan alamat berdasarkan karakteristik daerahnya dengan mengatur sifat dari masing-masing komponen. Selain pengaturan penulisan komponen alamat, penamaan jalan dan penomoran objek alamat (rumah/bangunan) juga perlu disertakan dalam standar penulisan alamat. Penomoran objek alamat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan wilayah, yang di Eropa dimulai pada pertengahan abad ke-18 (Rose-Redwood & Tantner, 2012), namun belum dimulai secara serius dan sistematis di Indonesia sampai saat ini. Penomoran objek yang banyak digunakan secara global adalah penomoran ganjil dan genap pada sisi jalan yang berbeda, model ini dikenalkan oleh negara Amerika Serikat (Heatcote, 2015).

Penomoran suatu objek tidak sesederhana mengurutkan nomor rumah, tetapi banyak faktor yang perlu dipertimbangkan seperti konsekuensi dari perubahan sistem terhadap dokumen-dokumen yang menyertakan informasi alamat. Terdapat banyak kasus dimana alamat rumah mengalami perubahan tetapi alamat secara administrasi masih berupa alamat lama yang akan menimbulkan masalah -masalah baru (Jha, 2011). Selain itu penggabungan lebih dari satu properti juga akan mengubah suatu informasi alamat dan perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan standar alamat seperti yang difasilitasi oleh Eden District Council dan Goochland County. Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam penomoran adalah perbedaan ukuran persil yang tidak dapat memastikan bahwa nomor rumah yang berseberangan merupakan nomor rumah ganjil genap yang berurutan (Minton, 2014).

Selain penomoran rumah yang perlu diatur dalam standar pengalamatan, penamaan jalan juga menjadi sumber inkonsistensi dalam suatu alamat. Sebagai contoh jalan dengan beberapa nama alias, penamaan jalan yang sama dalam suatu daerah, dan ketidakjelasan jenis prefiks yang ada pada suatu jalan. Amerika Serikat menggunakan nomor pada penamaan jalan yang jarang ditemukan di

Tabel 3. Komponen alamat perkotaan

Komponen alamat	Contoh	Sifat
Awalan nama jalan/gang	Jalan (Jln.), Gang	W
Nama jalan/gang	Kaliurang, Anggrek	W
Akhiran nama jalan	Angka kilometer	O
Awalan nomor rumah/bangunan	No., Nomor	O
Nomor rumah	1, 2, 6, 13, dll.	W
Akhiran nomor rumah/bangunan	A, B, C	K
Nama objek	Perumahan Kirana Lowanu	K
Nomor unit	No. 27	K
RT	RT 02	O
RW	RW 01	O
Pedukuhan	Karang	O
Kelurahan	Terban	W
Kecamatan	Gondokusuman	W
Kota	Yogyakarta	W
Provinsi	Daerah Istimewa Yogyakarta	W
Kode pos	55762	W

negera-negara di Eropa (Vuolteenaho, 2012). Sedangkan di Indonesia banyak terjadi ketidakkonsistenan penamaan jalan antara nama resmi dari pemerintah daerah dan nama populer yang banyak digunakan oleh masyarakat. Sebagai contoh, ruas jalan antara Jembatan Sungai Progo di Canguk, Magelang sampai Kopeng memiliki satu nama resmi (Jl. KH Khudori) dan tujuh nama tidak resmi yang digunakan oleh masyarakat dan aplikasi peta daring. Atas dasar tersebut maka regulasi standarisasi pengalamatan sangat dibutuhkan.

Standardisasi pengalamatan yang berlaku secara nasional diharapkan menjadi dukungan tata kelola pengalamatan yang baik. Penetapan regulasi standarisasi pengalamatan menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang bersifat sukarela dalam penerapannya (*voluntary*) perlu diimplementasikan ke berbagai wilayah agar alamat semakin teratur. Hal ini dapat dilakukan apabila standar pengalamatan diadopsi melalui peraturan daerah atau peraturan kepala daerah.

KESIMPULAN

Penulisan alamat yang merupakan objek penting dalam kehidupan sehari-hari memiliki variasi yang tinggi. Variasi terdapat pada penulisan alamat pada dokumen yang bersifat legal-administratif maupun alamat yang digunakan sebagai penanda, misalnya papan nama lembaga. Adanya variasi semacam ini disebabkan oleh faktor lokal/adat maupun karena ketiadaan standar penulisan alamat. Tipologi alamat yang ditemui merupakan khasanah kekayaan objek alamat yang dapat berpengaruh dalam standarisasi alamat. Elemen-elemen alamat yang bersifat umum dan ditemukan di banyak wilayah dapat dimasukkan sebagai komponen wajib dalam standar. Lokalitas penulisan alamat dapat diserap dalam standarisasi sebagai komponen opsional atau bersyarat.

Kebutuhan akan standar pengalamatan adalah sebuah keniscayaan dan tuntutan agar ketidakteraturan dapat dihindari. Kemajuan teknologi dalam pendataan wilayah

berbasis komputer yang semakin cepat dan canggih perlu diimbangi dengan regulasi yang dapat menjadi panduan dalam pengisian data alamat secara benar dan berstandar. Hasil kajian ini jika sudah ditetapkan sebagai sebuah standar nasional berupa SNI pengalamatan, perlu segera dilengkapi dengan panduan dan pedoman teknis yang lebih rinci, sehingga memudahkan para pihak dalam menuliskan alamat sesuai dengan aturan yang disepakati, baik di wilayah perdesaan dan perkotaan di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dibiayai oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) melalui skema RISPRO Tata Kelola dengan nomor kontrak LPDP-107/LPDP/2019. Ucapan terima kasih disampaikan kepada LPDP, UGM, dan BIG yang telah memberi dana dan memfasilitasi penelitian ini.

KONTRIBUSI PENULIS

Penulis pertama mendesain penelitian, melaksanakan survei lapangan, menganalisis data, dan membuat naskah publikasi. Penulis Kedua mendesain penelitian, melaksanakan survei lapangan, menganalisis data, dan membuat draf makalah. Penulis Ketiga mendesain penelitian, melakukan survei lapangan, dan menulis naskah publikasi. Penulis Keempat mendesain metode penelitian, melakukan survei lapangan, dan menulis naskah publikasi. Penulis Kelima melakukan survei lapangan dan menulis naskah publikasi. Penulis Keenam mendesain penelitian dan menulis naskah publikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, W., Hasanuddin, H., Muliono, M., Permatasari, Y., Amri, M. U., & Yurisman, Y. (2020). The Models of Nagari Indigenous Governments in West Sumatra. *Jurnal Bina Praja*, 12(1), 33–42. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.33-42>
- Chow, T. E., Dede-Bamfo, N., & Dahal, K. R. (2016). Geographic disparity of positional errors and matching rate of residential addresses among geocoding solutions. *Annals of GIS*, 22(1). <https://doi.org/10.1080/19475683.2015.1085437>

- Coetzee, S., & Bishop, J. (2009). Address databases for national SDI: Comparing the novel data grid approach to data harvesting and federated databases. *International Journal of Geographical Information Science*, 23(9), 1179–1209. <https://doi.org/10.1080/13658810802084806>
- Dumedah, G. (2021). Address points of landmarks and paratransit services as a credible reference database for geocoding. *Transactions in GIS*, 25(2), 1027–1048.
- Eden District Council. (n.d.-a). *Application for Address Allocation for New Street Name Property Number or Name for New Build or Conversion of Existing Building into Dwellings (Barn) for Commercial and Residential Properties*. 1–4. <http://www.eden.gov.uk/planning-and-development/street-naming-and-numbering/>
- Eden District Council. (n.d.-b). *Property Merge Street Naming and Numbering Application for Address Allocation Merge of two or more properties into a single property Property Use Once Merge is Complete Type of Residential Property Following Merge Property Merge*.
- Federal Geographic Data Committee. (2011). *FGDC-STD-016-2011 United States Thoroughfare, Landmark, and Postal Address Data Standard*.
- Goochland County Property Numbering and Street Naming Manual, (2017). <https://www.goochlandva.us/DocumentCenter/View/3978/Goochland-County-Property-Numbering-and-Street-Naming-Manual>
- Gluck, M. (1991). Making Sense of Human Wayfinding: Review of Cognitive and Linguistic Knowledge for Personal Navigation with a New Research Direction. *Cognitive and Linguistic Aspects of Geographic Space*, 117–135. https://doi.org/10.1007/978-94-011-2606-9_9
- Goldberg, D. W., Swift, J. N., & Wilson, J. P. (2008). *Geocoding Best Practices: Reference Data, Input Data and Feature Matching*. University of Southern California GIS Research Laboratory Technical Report No 8.
- Heatcote, E. (2015). Why house numbers were invented – and became a tool we count on. *Financial Times, October 20*(October), 7–12.
- Hockaday, J. (2008). *AS/NZS 4819:2013 : Geographic Information- Rural and Urban Addressing and AS/NZS 4590:2006 Interchange of Client Information*.
- ISO. (2015). *ISO 19160-1:2015 Addressing — Part 1: Conceptual model*.
- ISO. (2017). *ISO 19160-4 Addressing — International postal address components and template language*.
- Jha, D. (2011). *House numbers changed yet again*. Hindustan Times. <https://www.hindustantimes.com/india/house-numbers-changed-yet-again/story-SUpZyHg8K0tIMTj2ilc79N.htm>
- Land Information New Zealand. (2018). *Useful information for people working with Addresses* (Issue June). Land Information New Zealand.
- Lind, M. (2008). Addresses as an infrastructure component - Danish experiences and perspectives. *ISO Workshop on Address Standards: Considering the Issues Related to an International Address Standard*, May, 94–105.
- Minton, C. (2014). *Peculiar British House Numbering System*. Chandler's Ford Today. <https://chandlersfordtoday.co.uk/author/chippy-minton/>
- Ratcliffe, J. H. (2004). Geocoding crime and a first estimate of a minimum acceptable hit rate. *International Journal of Geographical Information Science*, 18(1), 61–72. <https://doi.org/10.1080/13658810310001596076>
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nama Rupa Bumi*.
- Rose-Redwood, R., & Tantner, A. (2012). Introduction: Governmentality, house numbering and the spatial history of the modern city. *Urban History*, 39(4), 607–613. <https://doi.org/10.1017/S0963926812000405>
- Setiawan, B. (1998). *Local dynamics in informal settlement development : a case study of Yogyakarta, Indonesia*. Doctoral dissertation of The University of British Columbia.
- South African Bureau of Standards (SABS). (2009a). *SANS 1883-1, Geographic information – Address, Part 1: Data format of addresses*.
- South African Bureau of Standards (SABS). (2009b). *SANS 1883-3, Geographic information – Address, Part 3: Guidelines for address allocation and updates*.
- Author, 2016
- Author, 2021
- Universal Postal Union. (2013). *Postal addressing systems in member countries and/or territories: Indonesia*. <https://www.upu.int/UPU/media/upu/PostalEntitiesFiles/addressingUnit/idnEn.pdf>
- Vuolteenaho, J. (2012). Numbering the streetscape: Mapping the spatial history of numerical street names in Europe. *Urban History*, 39(4), 659–679. <https://doi.org/10.1017/S0963926812000442>